JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 4 Juni 2026 | **Revised**: 5 Juli 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin

Mistri Aprianty[1], Setia Budhi[2], Jamaluddin[3]
[1]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, mistriaprianty@gmail.com.
[2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, setia.budhi@ulm.ac.id.
[3]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, jamaluddin.fisip@ulm.ac.id.

Corresponding Author: mistriaprianty@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Mayor Regulation of Banjarmasin Number 118 of 2024 concerning the acceleration of stunting reduction in Banjarmasin. The primary issue addressed in this research is that the implementation of the policy has not yet been optimal, despite the various programs that have been carried out by the local government. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Health Office of Banjarmasin, sub-district officials, as well as health workers and community cadres. The analysis is based on the policy implementation model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn, which includes six variables: policy standards and objectives, resources, communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic conditions, and the disposition of implementers. The findings indicate that the policy implementation has been carried out; however, it has not yet achieved optimal results. This condition is influenced by several constraints, including limited resources, ineffective communication, suboptimal intersectoral coordination, low public awareness, and inadequate environmental conditions. On the other hand, several supporting factors have contributed to the implementation process, including the commitment of the local government, the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), the active involvement of health workers and community cadres, and the application of a cross-sectoral convergence approach. Therefore, the success of policy implementation is highly dependent on the ability of the local government to integrate these variables in a simultaneous and sustainable manner. In conclusion, the implementation of the stunting reduction policy in Banjarmasin requires strengthening in terms of resources, coordination, and communication, as well as enhancing community participation. Therefore, more integrated and comprehensive efforts are needed to ensure that the policy objectives can be achieved effectively*

Keyword: *Policy Implementation, Stunting, Van Meter And Van Horn, Local Government, Banjarmasin*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, aparat kecamatan, serta tenaga kesehatan dan kader di lapangan. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum efektif, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan kondisi lingkungan yang belum memadai. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan, antara lain komitmen pemerintah daerah, keberadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), peran aktif tenaga kesehatan dan kader, serta penerapan pendekatan konvergensi lintas sektor. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai faktor tersebut secara simultan dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi, dan komunikasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Van Meter Dan Van Horn, Pemerintah Daerah, Banjarmasin

PENDAHULUAN

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani permasalahan stunting secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Peraturan ini disusun sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, dengan mengatur peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh seluruh daerah.

Melalui Perwali Nomor 118 Tahun 2024, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan arah kebijakan percepatan penurunan stunting yang tidak hanya berfokus pada intervensi kesehatan, tetapi juga mencakup intervensi gizi sensitif yang melibatkan sektor sosial, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini juga menjadi landasan pembentukan dan penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pendampingan keluarga berisiko stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Dampak stunting tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, tingkat pendidikan, produktivitas ekonomi, serta daya saing daerah di masa depan. Oleh karena

itu, percepatan penurunan stunting menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah keputusan politik dan administratif diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat pelaksana. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif (Pressman & Wildavsky, 1984). Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel, antara lain standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (*sikap pelaksana*), dan struktur birokrasi.

Salah satu kebijakan publik yang menuntut implementasi lintas sektor adalah kebijakan percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pembagian peran antar organisasi perangkat daerah, serta koordinasi lintas sektor melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Stunting masih menjadi salah satu masalah serius kesehatan masyarakat di Indonesia. Prevalensi stunting nasional sebesar 21,6% pada tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023, yang masih jauh dari target pemerintah sebesar 14% (Bappenas, 2020). Di Provinsi Kalimantan Selatan, prevalensi stunting mencapai 24,6% (SSGI, 2022), sedangkan Kota Banjarmasin mencatat prevalensi sekitar 26,5% dengan jumlah balita stunting mencapai 1.283 anak (Dinkes Banjarmasin, 2023).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jumlah kasus stunting meningkat dari 1.270 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.432 kasus pada tahun 2024. Kecamatan Banjarmasin Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi pada kedua tahun tersebut, yaitu 398 kasus pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 445 kasus pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting masih berada pada tahap awal pelaksanaan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya terlihat signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji implementasi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi kebijakan, termasuk peran aktor pelaksana serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat apabila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang inginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor organisasi, prosedur, dan teknik secara bersama dan simultan (serentak). Menurut Bambang Sugono (1994:137) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman dalam bertindak, dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan jugak dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. Menurut imbron (2002:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai - nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a *projected program of goal*, *value*, *and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai - nilai dalam praktek - praktek yang terarah. Menurut Pressman dan Widavsky (2002 : 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi - kondisi awal dan akibat - akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk - bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor - faktor bukan pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Matar (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan - tindakan tersebut mencakup usaha - usaha untuk mengubah keputusa - keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha - usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang - undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Secara umum, stunting dapat dipahami sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini biasanya mulai terjadi sejak masa kehamilan dan terus berlanjut hingga anak berusia dua tahun, yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada periode tersebut, kebutuhan gizi anak sangat tinggi sehingga apabila tidak terpenuhi secara optimal, akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan.

Konvergensi Program Penanggulangan Stunting

Konvergensi program penanggulangan stunting merupakan pendekatan strategis yang menekankan pada keterpaduan, kolaborasi, dan sinkronisasi berbagai sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa penyebab stunting bersifat multidimensional tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi pada ibu dan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta pelayanan dasar yang tidak merata. Oleh karena itu, upaya penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, melainkan harus melibatkan berbagai sektor secara terpadu dalam satu sistem kebijakan dan program yang terkoordinasi. Menurut Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, konvergensi didefinisikan sebagai upaya bersama antar sektor, lintas program, dan antar tingkatan

pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada Januari–April 2026. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, sedangkan sampel atau informan ditentukan secara *purposive sampling*, meliputi pejabat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Mantuil, serta Koordinator Bagian Gizi Puskesmas Mantuil. Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Mantuil, diperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting.

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn(1975) yang meliputi enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan dalam Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2024 secara normatif telah dirumuskan dengan jelas sebagai upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi antara intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai perangkat daerah hingga tingkat paling bawah, yaitu kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, para pelaksana pada umumnya telah memahami arah kebijakan tersebut, namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program yang konkret dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa :

"Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sebenarnya tujuan dari Perwali ini sudah sangat jelas, yaitu bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting secara bertahap melalui intervensi yang terintegrasi. Kami di dinas juga sudah memiliki panduan dan target yang harus dicapai, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan memang tidak semudah itu, karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga seringkali program yang sudah dirancang harus disesuaikan kembali. Selain itu, koordinasi antar sektor juga menjadi tantangan tersendiri karena masing-masing memiliki program dan prioritas yang berbeda".

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan secara sistematis, implementasinya memerlukan penyesuaian yang kontekstual. Hal yang sama

juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menyatakan bahwa :

"Di tingkat kecamatan kami memahami betul bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan angka stunting, tetapi dalam praktiknya kami sering menghadapi kesulitan ketika harus menyampaikan program tersebut ke masyarakat. Tidak semua masyarakat langsung memahami pentingnya program ini, sehingga kami harus melakukan pendekatan secara bertahap, bahkan terkadang harus menjelaskan berulang-ulang agar mereka benar-benar mengerti".

Sementara itu, Pihak kelurahan sebagai pelaksana yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi di lapangan. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Mantuil mengungkapkan bahwa :

"Di tingkat kelurahan kami memang sudah menjalankan program sesuai dengan arahan dari pemerintah kota, seperti pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan oleh kader, serta kegiatan sosialisasi. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dari program ini, bahkan ada yang menganggap bahwa stunting itu hal biasa. Oleh karena itu, kami harus terus melakukan pendekatan secara persuasif, tidak hanya melalui kegiatan formal tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat agar mereka bisa lebih memahami pentingnya pencegahan stunting".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Dan Tujuan Kebijakan telah dipahami oleh para pelaksana di semua tingkatan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan penyesuaian program dengan kondisi lokal.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kejelasan tujuan kebijakan secara normatif dengan pemahaman teknis di lapangan. Dalam teori Van Meter dan Van Horn(1975), standar dan tujuan kebijakan harus dipahami secara seragam oleh pelaksana agar implementasi berjalan efektif. Ketidakmerataan pemahaman ini berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan program yang tidak optimal

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun sumber daya telah tersedia, namun masih terdapat berbagai keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator Gizi Puskesmas Mantuil yang menyatakan bahwa :

"kalau dari segi tenaga, sebenarnya kami sudah memiliki tenaga kesehatan dan kader yang cukup aktif di lapangan, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah sasaran, tentu masih sangat kurang. Dalam satu wilayah saja jumlah keluarga yang harus didampingi cukup banyak, sehingga kami tidak bisa melakukan pendampingan secara maksimal kepada semua sasaran. Selain itu, kami juga memiliki tugas lain di luar program stunting, sehingga waktu yang tersedia menjadi terbagi".

Dari sisi anggaran, Ketua kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa :

"Pemerintah daerah sebenarnya sudah memberikan dukungan anggaran untuk program ini, tetapi dalam praktiknya masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kegiatan yang direncanakan, terutama kegiatan yang bersifat langsung ke masyarakat seperti penyuluhan dan pemberian intervensi tambahan. Kadang kami harus melakukan prioritas kegiatan karena keterbatasan anggaran tersebut".

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Kelurahan Mantuil juga mengungkapkan kondisi yang dihadapi di tingkat lapangan, dimana informan menyatakan bahwa :

"Di kelurahan kami sering menghadapi keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun dukungan operasional. Misalnya dalam kegiatan sosialisasi atau pendampingan, kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak semua kegiatan bisa berjalan sesuai rencana karena keterbatasan tersebut. Selain itu, kader juga sering bekerja secara sukarela sehingga tentu ada keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu".

Selain itu, kader posyandu juga menyampaikan bahwa :

"Di lapangan kami masih kekurangan beberapa alat pendukung seperti alat ukur tinggi badan dan media edukasi yang memadai, sehingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi kurang maksimal".

Dengan demikian, Berdasarkan Hasil wawancara keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimana Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sumber daya yang dimiliki, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, masih tergolong terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari jumlah pelaksana yang belum memadai serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung juga belum sepenuhnya memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini ditunjukkan melalui adanya struktur organisasi yang jelas, yaitu dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan. Struktur ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan secara sistematis.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas organisasi pelaksana masih dipengaruhi oleh koordinasi antar unit kerja. Ketua kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa

"secara struktur organisasi sebenarnya sudah sangat jelas, karena setiap tingkatan sudah memiliki peran masing-masing dalam TPPS. Namun dalam pelaksanaannya, koordinasi antar unit masih perlu diperkuat, karena masing-masing instansi memiliki program sendiri sehingga terkadang belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi".

Di tingkat kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan Dan Kemasyarakatan juga mengungkapkan bahwa :

"kami di kelurahan memiliki peran yang cukup penting karena langsung berhadapan dengan masyarakat, tetapi terkadang koordinasi dengan pihak lain belum berjalan maksimal. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan, tidak semua pihak dapat hadir atau terlibat secara aktif, sehingga pelaksanaan program menjadi kurang optimal".

Berdasarkan Hasil wawancara hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan baik, efektivitas pelaksanaan masih memerlukan penguatan dalam hal koordinasi dan integrasi antar pelaksana. Komunikasi merupakan aspek yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi, koordinasi, serta konsistensi pesan antar pelaksana. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Sosialisasi kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga tidak semua pihak memahami isi dan tujuan kebijakan secara utuh. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan secara optimal, yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini

berdampak pada kurang efektifnya implementasi di lapangan, karena setiap pelaksana cenderung bekerja berdasarkan pemahaman masing-masing.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama karena kebijakan percepatan penurunan stunting melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi telah dilakukan melalui berbagai forum, namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Informan Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga Dan Gizi dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa :

"koordinasi antar instansi sebenarnya sudah dilakukan melalui rapat-rapat dan kegiatan sosialisasi, tetapi memang belum bisa berjalan secara rutin dan konsisten. Kadang ada kendala waktu dan kesibukan masing-masing instansi sehingga komunikasi tidak berjalan optimal".

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Dan Kemasyrakatan Kelurahan Mantuil juga mengungkapkan bahwa :

"kami di kelurahan terkadang menerima informasi yang tidak secara lengkap atau tidak secara langsung, sehingga dalam pelaksanaannya kami harus menyesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program".

Selain itu, kader Posyandu menyatakan bahwa :

"Dalam menyampaikan informasi ke masyarakat juga tidak selalu mudah, karena tidak semua masyarakat langsung menerima atau memahami informasi yang diberikan".

Dengan demikian, Berdasarkan hasil wawancara Komunikasi Antar Organisasi dan dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat beberapa organisasi atau instansi yang terlibat, baik di tingkat kota maupun kecamatan. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam hal koordinasi dan integrasi antar organisasi pelaksana. Fragmentasi kewenangan dan kurangnya kejelasan pembagian tugas menjadi faktor yang menghambat terciptanya sinergi antar lembaga. Selain itu, mekanisme koordinasi yang belum terstruktur dengan baik juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Dengan demikian, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih terintegrasi.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak. Kepala Seksi Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Dari Kelurahan Mantuil mengungkapkan bahwa:

"Di lapangan kami melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya gizi bagi anak. Bahkan ada yang menganggap bahwa kondisi anak yang pendek itu adalah hal yang biasa atau faktor keturunan, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melakukan pencegahan".

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala, sebagaimana disampaikan bahwa :

"Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga program yang ada harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi masyarakat".

Berdasarkan Hasil wawancara dari sisi pemerintah daerah terdapat dukungan yang cukup kuat, sehingga kebijakan ini tetap dapat berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Faktor eksternal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi sosial masyarakat yang beragam, tingkat kesadaran yang masih rendah, serta keterbatasan ekonomi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau mendukung kebijakan yang diterapkan, sehingga partisipasi masyarakat masih belum optimal. Selain itu, kondisi ekonomi yang terbatas juga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada. Faktor lingkungan juga turut berperan dalam

menentukan efektivitas implementasi, terutama dalam hal akses dan ketersediaan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal masyarakat.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi pelaksana menunjukkan sikap, komitmen, dan motivasi aparat dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Mantuil yang menyatakan bahwa :

"Kami di kelurahan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program ini karena kami melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Meskipun ada banyak keterbatasan, kami tetap berupaya melakukan pendampingan dan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih memahami pentingnya pencegahan stunting".

Namun demikian, Kader Posyandu juga mengungkapkan bahwa :

"motivasi kami memang tinggi, tetapi terkadang terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan dukungan yang ada, sehingga kami berharap ke depan ada peningkatan dukungan agar program ini bisa berjalan lebih maksimal".

Berdasarkan hasil wawancara disposisi pelaksana dapat dikatakan sudah baik, namun tetap memerlukan dukungan yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal. Disposisi pelaksana mencerminkan tingkat komitmen, pemahaman, dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para pelaksana memiliki sikap yang cukup baik dan menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi dalam pelaksanaan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana. Sikap positif pelaksana merupakan modal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, namun tanpa didukung oleh faktor lain seperti sumber daya dan komunikasi yang efektif, maka hasil yang dicapai tetap belum optimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil Wawancara Penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2024 di Kelurahan Mantuil, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal apabila ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

Pada variabel standar dan tujuan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan percepatan penurunan stunting pada dasarnya telah dirumuskan secara jelas dan telah dipahami oleh para pelaksana kebijakan di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan kesulitan dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam program yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus dipahami secara jelas dan seragam oleh pelaksana agar implementasi dapat berjalan efektif. Dalam penelitian ini, meskipun tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, pemahaman masyarakat yang masih rendah menyebabkan implementasi belum berjalan secara optimal.

Pada variabel sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Jumlah tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tersedia belum sebanding

dengan jumlah sasaran yang harus didampingi. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program dapat dilaksanakan secara maksimal. Sarana pendukung seperti alat ukur dan media edukasi juga masih kurang memadai. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya akan menghambat efektivitas pelaksanaan program karena pelaksana tidak dapat menjalankan kebijakan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dalam penelitian ini, dimana keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya pada variabel karakteristik organisasi pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana sebenarnya telah terbentuk dengan cukup jelas melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan. Struktur tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara terintegrasi. Namun demikian, koordinasi antar organisasi pelaksana masih belum berjalan optimal. Masing-masing instansi masih cenderung menjalankan program berdasarkan tugas dan prioritas masing-masing sehingga integrasi pelaksanaan program belum sepenuhnya tercapai. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, terutama berkaitan dengan struktur birokrasi, pola hubungan kerja, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan. Kurangnya koordinasi antar organisasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana masih memerlukan penguatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Pada variabel komunikasi antar organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar instansi sebenarnya telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi. Akan tetapi, komunikasi tersebut belum berjalan secara konsisten dan efektif. Informasi mengenai pelaksanaan program terkadang tidak diterima secara lengkap oleh pelaksana di tingkat bawah, sehingga pelaksanaan program di lapangan harus kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat juga masih mengalami hambatan karena tidak semua masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan dengan baik. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaksana. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi perbedaan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut terlihat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Mantuil.

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Masih terdapat masyarakat yang menganggap stunting sebagai hal biasa atau faktor keturunan sehingga kurang memahami pentingnya pencegahan stunting. Selain itu, keterbatasan ekonomi masyarakat juga menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun demikian, dari sisi politik terdapat dukungan yang cukup baik dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi tantangan utama yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, pada variabel disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan motivasi yang cukup baik dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Aparat kelurahan, tenaga kesehatan, dan kader posyandu tetap berupaya melaksanakan program meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Sikap positif dan komitmen para pelaksana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang tersedia menyebabkan pelaksanaan program belum dapat berjalan secara maksimal. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap,

komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Semakin baik disposisi pelaksana, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, komitmen pelaksana dalam penelitian ini menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Mantuil telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama implementasi kebijakan terletak pada keterbatasan sumber daya, komunikasi antar organisasi yang belum efektif, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, adanya komitmen pelaksana dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung yang cukup penting dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya, optimalisasi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai kerangka formal, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan:

1) Penguatan koordinasi lintas sektor
2) Peningkatan kapasitas sumber daya
3) Perbaikan komunikasi kebijakan
4) Peningkatan partisipasi masyarakat

Agar tujuan utama kebijakan, yaitu penurunan angka stunting, dapat tercapai secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin. Faktor pendukung ini menjadi modal awal dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun belum sepenuhnya mampu mendorong implementasi berjalan optimal.

Kejelasan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif. Tujuan kebijakan yang jelas memberikan arah dan pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan program, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kejelasan ini memudahkan pelaksana dalam memahami arah kebijakan, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek teknis pelaksanaan.

ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan dan ahli gizi menjadi faktor pendukung yang signifikan. Keberadaan tenaga kesehatan memungkinkan pelaksanaan intervensi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara kapasitas teknis, implementasi kebijakan memiliki potensi untuk berjalan dengan baik.

Telah terbentuknya struktur kelembagaan melalui tim percepatan penurunan stunting (tpps) dari tingkat kota hingga kelurahan. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa kebijakan telah didukung oleh sistem kelembagaan yang jelas, sehingga secara administratif pelaksanaan program memiliki dasar yang kuat.

Komitmen sebagian pelaksana, khususnya tenaga kesehatan, juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Komitmen ini tercermin dari keterlibatan aktif dalam kegiatan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Sikap proaktif pelaksana menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan posyandu juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Meskipun masih terbatas, keberadaan posyandu sebagai sarana pelayanan berbasis masyarakat memungkinkan program penurunan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, faktor pendukung implementasi kebijakan ini pada dasarnya telah tersedia, baik dari aspek tujuan, sumber daya manusia, kelembagaan, maupun komitmen pelaksana. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan faktor-faktor tersebut secara terpadu

Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, implementasi kebijakan juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang cenderung lebih dominan dan kompleks. Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini mencakup jumlah kader posyandu yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Keterbatasan sumber daya ini berdampak langsung pada pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan yang bersifat promotif dan preventif seperti edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kurangnya pemahaman teknis di kalangan pelaksana juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Meskipun tujuan kebijakan telah dipahami secara umum, namun belum semua pelaksana memahami secara rinci peran, tugas, dan target yang harus dicapai. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan.

Lemahnya koordinasi antar instansi. Meskipun telah dibentuk struktur kelembagaan melalui tpps, namun dalam praktiknya koordinasi belum berjalan optimal. Masih terdapat kecenderungan masing-masing instansi bekerja secara sendiri-sendiri, yang menunjukkan adanya ego sektoral. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara terintegrasi.

Pola komunikasi yang masih bersifat top-down. Informasi kebijakan belum tersampaikan secara merata hingga ke tingkat pelaksana bawah dan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Keterbatasan ekonomi masyarakat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, sementara kondisi sanitasi dan lingkungan yang kurang baik turut meningkatkan risiko stunting. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan pola asuh juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan.

disposisi pelaksana yang belum merata juga menjadi hambatan. Meskipun terdapat pelaksana yang memiliki komitmen tinggi, namun masih ada pelaksana yang menjalankan tugas secara administratif tanpa keterlibatan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih bergantung pada individu, bukan pada sistem yang kuat.

Dengan demikian, faktor penghambat implementasi kebijakan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, teknis, koordinatif, dan kontekstual. Dominasi faktor penghambat ini menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Wawancara dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sebagaimana dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn(1975).

Pertama, dari aspek standar dan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, yaitu menurunkan angka stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Namun, kejelasan tujuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman teknis yang merata di kalangan pelaksana. Masih terdapat pelaksana yang belum memahami secara rinci peran, tugas, serta target yang harus dicapai, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi tidak seragam.

Kedua, dari aspek sumber daya**,** implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana. Meskipun tenaga kesehatan tersedia dalam jumlah yang cukup, keterbatasan kader posyandu serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program, khususnya pada kegiatan promotif dan preventif.

Ketiga, dari aspek karakteristik organisasi pelaksana, struktur kelembagaan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk hingga tingkat kelurahan. Namun, dalam pelaksanaannya koordinasi antar instansi belum berjalan optimal dan masih terdapat ego sektoral, sehingga program belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Keempat, dari aspek komunikasi antar organisasi, komunikasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Pola komunikasi yang masih bersifat top-down menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaksana dan masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Kelima, dari aspek kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, faktor eksternal seperti kemiskinan, sanitasi yang kurang baik, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait gizi dan pola asuh menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan.

Keenam, dari aspek disposisi pelaksana, sebagian pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program, namun masih terdapat variasi dalam tingkat komitmen. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara konsisten dan masih bergantung pada individu pelaksana.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor penghambat masih lebih dominan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. (2023). *Data stunting Kota Banjarmasin tahun 2023*. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku saku hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting*. Bappenas.

Laswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and society*. Yale University Press.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2024). *Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Pemerintah Republik Indonesia.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488.
WHO. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief*. World Health Organization.